

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	6
E. Kerangka Berpikir	7
F. Hasil Penelitian Terdahulu	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Asal-Usul Anak dan Nasab	18
B. Perkawinan Tidak Tercatat: Nikah Sirri, Nikah Fasid/Batil, dan Syubhat ...	19
C. Ratio Decidendi dan Metode Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>).....	20
D. Kaidah Ushuliyah: Al-Ashlu fil Insani al-Barā'ah.....	21
E. Kaidah Fiqhiyyah: Lā Dharara wa Lā Dhirār dan Syubhat	21
F. Kerangka Yuridis Perlindungan Anak	22
G. Konsep Disparitas Putusan dalam Peradilan.....	23
H. Maqashid al-Syari'ah dan Teori Kepastian Hukum sebagai Kerangka Integratif	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	27
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30
E. Tempat Penelitian	31
F. Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian	33
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Asal-Usul Anak Pada Penetapan Nomor 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg dan Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt.....	34
C. Landasan Hukum dan Metode Penetapan Hakim Dalam Perkara Asal-Usul Anak Pada Kedua Penetapan.....	36
1. Divergensiasi Hermeneutika Penemuan Hukum (Rechtsvinding)	37
2. Implikasi Hukum Pembuktian Formil dan Cacat Hukum Perkawinan ...	37
3. Intepretasi dan Transformasi Normatif Pasca Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010.....	38
4. Pertimbangan Masalah Mursalah dan Kondisi Sosiologis	38
D. Implikasi Hukum Disparitas terhadap Status Anak, Kepastian Hukum, dan Sistem Peradilan	38
1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum (Legal Certainty) dan Prinsip Equality Before the Law	39
2. Dilema Operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	39
3. Implikasi Keperdataan Islam: Hak Waris, Nasab, dan Perawalian	39

4. Urgensi Unifikasi Peradilan dan Rekomendasi Kebijakan (Siyasah Syar'iyah)	40
E. Sintesis Analisis dan Benang Merah Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN 1: Penetapan Pengadilan Agama Bandung (Penetapan No. 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg)	50
LAMPIRAN 2: Penetapan Pengadilan Agama Garut (Penetapan No. 699/Pdt.P/2025/PA.Grt)	71

